



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS KESEHATAN

Jalan Prof.M. Yamin, SH No.233 Bengkulu Utara Kode Pos 38611
Telepon (0737) 521030 Fax. (0737) 522535

KEPUTUSAN KEPALA PERANGKAT DAERAH
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 91 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri dibawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Bengkulu Utara No. 34 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 34) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 34 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara,
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU dipergunakan sebagai acuan dalam perencanaan Pelapor dan Evaluasi pelaksanaan program dan Kegiatan setiap tahun.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan terbitnya Surat Keputusan Ini Maka Surat Keputusan yang lama tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di Argamakmur
Pada tanggal Juni 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Utara



SAMSUL MAARIF, SKM. M.Kes
Pembina TK I/Nip. 196410101988031006

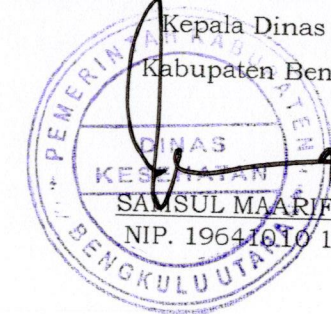
**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2020**

VISI : Terwujudnya Kesehatan Masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara
MISI : Membangun Pelayanan Masyarakat
TUJUAN : Mewujudkan Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik lainnya yang berkualitas

Sasaran	Indikator Sasaran	Penjelasan / Formula Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan	1 Nilai/Predikat AKIP	Sesuai dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 700/002.A/Itkab/2018 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Hasil Evaluasi AKIP dari Inspektorat Kabupaten	Ka. Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas
Meningkatkannya Kualitas Kesehatan	2 Indek Pembangunan Kesehatan Masyarakat	Indikator komposit (24 indikator kesehatan) yang menggambarkan kemajuan pembangunan (terlampir)	Dinas Kesehatan	Ka. Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas
	3 Angka Usia Harapan Hidup	Angka Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur { AKB meningkat UHH Menurun dan AKB Menurun UHH Menigkat } Cara mengetahui Angka Usia Harapan Hidup adalah Umur masing2 yg meninggal dijumlahkan semuanya di bagi jumlah yg orang yang meninggal ditahun tersebut	Kantor Pusat Statistis Kab. dan Dinas Kesehatan	Ka. Dinas Kesehatan Sekretaris Dinas

Arga Makmur, Juni 2020

Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Bengkulu Utara



SAMSUL MAARIF, SKM, M.Kes
NIP. 19641010198803 1 006

Lampiran INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator komposit (24 indikator kesehatan) yang menggambarkan kemajuan pembangunan kesehatan. Indikator kesehatan tersebut adalah

1. Prevalensi balita gizi buruk dan kurang,
2. Prevalensi balita sangat pendek dan pendek,
3. Prevalensi balita sangat kurus dan kurus,
4. Prevalensi balita gemuk,
5. Prevalensi diare,
6. Prevalensi pneumonia,
7. Prevalensi hipertensi,
8. Prevalensi gangguan mental,
9. Prevalensi asma,
10. Prevalensi penyakit gigi dan mulut,
11. Prevalensi disabilitas,
12. Prevalensi cedera,
13. Prevalensi penyakit sendi,
14. Prevalensi ISPA,
15. Proporsi perilaku cuci tangan,
16. Proporsi merokok tiap hari,
17. Akses air bersih,
18. Akses sanitasi,
19. Cakupan persalinan oleh nakes,
20. Cakupan pemeriksaan neonatal-1,
21. Cakupan imunisasi lengkap,
22. Cakupan penimbangan balita,
23. Ratio Dokter/Puskesmas, Rasio dokter terhadap 3000 penduduk
24. dan Ratio bidan/desa. Rasio bidan terhadap 1000 penduduk

Formulasi perhitungan 24 indikator komposit (RPJMD 2016-2021)

1. Prevalensi Balita Gizi Buruk dan Kurang

Prevalensi Balita Gizi Buruk : Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari dengan kategori indeks berat badan menurut umur (BB/U) dengan z-score < -2 sampai dengan -3 standar deviasi

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang diukur indeks berat badan menurut umur (BB/U)}}{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang diukur indeks berat badan menurut umur (BB/U)}} \times 100 \%$$

Prevalensi Balita Gizi kurang : Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari dengan kategori indeks berat badan menurut umur (BB/U) dengan z-score > -3 standar deviasi

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang diukur indeks berat badan menurut umur (BB/U)}}{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang diukur indeks berat badan menurut umur (BB/U)}} \times 100 \%$$

2. Prevalensi Balita Pendek dan Sangat Pendek

Prevalensi Balita Pendek : Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari dengan kategori indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan z-score < -2 sampai dengan -3 standar deviasi

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)}}{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)}} \times 100 \%$$

Prevalensi Balita Sangat Pendek : Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari dengan kategori indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan z-score > -3 standar deviasi

$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)}}{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang diukur indeks panjang badan menurut umur (PB/U) atau tinggi badan menurut umur (TB/U)}} \times 100 \%$$

3. Prevalensi Balita Kurus dan Sangat Kurus

Prevalensi Balita Kurus :
$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari dengan kategori indeks berat badan menurut panjang (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan z-score} < -2 \text{ sampai dengan } -3 \text{ standar deviasi}}{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang diukur indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)}} \times 100 \%$$

Prevalensi Balita Sangat Kurus :
$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari dengan kategori indeks berat badan menurut panjang (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan z-score} > -3 \text{ standar deviasi}}{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang diukur indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)}} \times 100 \%$$

4. **Prevalensi Gemuk** :
$$\frac{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari dengan kategori indeks berat badan menurut panjang (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) dengan z-score} > 3 \text{ standar deviasi}}{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang diukur indeks berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan menurut tinggi badan (BB/TB)}} \times 100 \%$$

5. **Prevalensi Diare** :
$$\frac{\text{Jumlah penderita diare SU dilayani dalam 1 tahun}}{\text{Target Penemuan Penderita Diare semua umur}} \times 100$$

6. **Prevalensi Pneumonia** :
$$\frac{\text{Jumlah Penderita Pneumonia diobati}}{\text{Jumlah perkiraan Pneumonia}} \times 100\%$$

7. **Prevalensi Hipertensi** :
$$\frac{\text{Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

8. **Prevalensi gangguan mental** :
$$\frac{\text{Jumlah Penderita gangguan mental yang mendapatkan pelayanan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penderita gangguan mental berdasarkan proyeksi kab/kota dalam 1 tahun}} \times 100\%$$

9. **Prevalensi Asma** : $\frac{\text{Jumlah penderita asma yang mendapatkan pelayanan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk semua umur dalam 1 tahun}} \times 100 \%$
10. **Prevalensi penyakit gigi dan mulut** : $\frac{\text{Jumlah kasus yang ditemukan dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah kunjungan Pasien Gigi dalam kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$
11. **Prevalensi Disabilitas** : $\frac{\text{Jumlah Disabilitas dalam 1 tahun}}{40\% \text{ Jumlah penduduk}} \times 100 \%$
12. **Prevelansi Cedera** : $\frac{\text{Jumlah penduduk yang cedera dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk semua umur dalam 1 tahun}} \times 100\%$
13. **Prevelansi Penyakit Sendi** : $\frac{\text{Jumlah penyakit sendi yang mendapatkan pelayanan dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk} \geq 15 \text{ tahun dalam 1 tahun}} \times 100\%$
14. **Prevalensi ISPA** : $\frac{\text{Jumlah Penderita Baru}}{\text{Jumlah penduduk di wilayah tertentu}} \times 100 \%$
15. **Proporsi perilaku cuci tangan** : $\frac{\text{Ketersedian tempat cuci tangan}}{\text{Jumlah KK pada kurun waktu tertentu}} \times 100 \%$
16. **Proporsi merokok tiap hari** : $\frac{\text{Jumlah orang yang merokok dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$
17. **Akses Air bersih** : $\frac{\text{Jmlh penduduk yang sudah terlayani (menggunkan) air bersih}}{\text{Jumlah penduduk yang ada/keseluruhan}} \times 100 \%$
18. **Akses Sanitasi** : $\frac{\text{Jumlah penduduk yang sudah menggunakan (BAB) dengan jamban sehat}}{\text{Jumlah penduduk yang ada/keseluruhan}} \times 100\%$
19. **Cakupan Persalinan oleh Naker** : $\frac{\text{Jmlh ibu bersalin yang mendapatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin disuatu wilayah kerja pada waktu tertentu}} \times 100 \%$
20. **Cakupan Pemeriksaan Neonatal** : $\frac{\text{Jumlah Neonatus yang mendapat, layanan sd standar pada 6-48 jam setelah lahir pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sel sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}} \times 100\%$

21. **Cakupan imunisasi lengkap :** $\frac{\text{Jumlah Bayi yang mendapatkan Imunisasi Dasar lengkap di wilayah tertentu diwilayah tertentu selama satu periode}}{\text{Jumlah bayi yang ada hidup selama satu periode}} \times 100 \%$
22. **Cakupan Penimbangan Balita (D/S) :** $\frac{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang datang dan ditimbang diposyandu atau fasilitas kesehatan lainnya}}{\text{Jumlah anak usia 0 sampai 59 bulan 29 hari yang berada diwilayah tersebut}} \times 100 \%$
23. **Ratio Dokter/Puskesmas,** Rasio dokter terhadap 3000 penduduk
(Jumlah dokter / 3000 penduduk)
24. **Ratio bidan/desa.** Rasio bidan terhadap 1000 penduduk
(Jumlah Bidan / 1000 Penduduk)